

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya

Ade Iskandar

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara

Eka Suaib

Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang

Malik

Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)

H. Muh. Amir

Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis Single Identity di Kabupaten Lampung Utara

Nia Janati

Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program *Rural Infrastructure Support* PNPM Provinsi Lampung

Selvi Diana Meilinda

Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara

Yadi Lustiadi



# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

### **Pembina**

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

### **Penanggung Jawab**

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

### **Ketua Penyunting**

Dr. Malik, M.Si

### **Penyunting Ahli**

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Supriyanto, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

### **Penyunting Pelaksana**

Dra. Azima Dimiyati, MM

Vida Yunia Cancer, S.AN

### **Tata Usaha**

Winda, SE

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

### **Alamat Redaksi**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

# e-JKPP

## Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

### DAFTAR ISI

Implementasi Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya	1-13
<b>Ade Iskandar</b>	
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Lambai di Kabupaten Kolaka Utara	14-29
<b>Eka Suaib</b>	
Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Dengan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang	30-46
<b>Malik</b>	
Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Kendari Barat)	47-60
<b>H. Muh. Amir</b>	
Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis <i>Single Identity</i> di Kabupaten Lampung Utara	61-70
<b>Nia Janati</b>	
Evaluasi Pengarusutamaan Gender Dalam Program <i>Rural Infrastructure Support</i> PNPM Provinsi Lampung	71-87
<b>Selvi Diana Meilinda</b>	
Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara	88-101
<b>Yadi Lustiadi</b>	

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA  
MISKIN (RASKIN) TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KENDARI BARAT)**

OLEH

H. MUH. AMIR, DOSEN PADA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FISIP UHO

---

**ABSTRACT**

*This research entitle the Policy Implementation program the Rice For The Family of Impecunious in Subdistrict of Kendari of West of Town Kendari. This Research study and know and also clarify the things which is concerning implementation of Rice policy For The Family of Impecunious.*

*This research use the method of survai clarification explanatory survey method, in line with this research to analyse the influence usher the variable, that is Influence of Implementation of policy Rice Policy For The Family of Impecunious as free variable (independent variable) with the effectiveness of overcoming poorness in Subdistrict of Kendari West, as variable trussed (dependent variable). Researcher use the research approach in line with which wish reached by that is besides depicting and explaining fact empirik found in field, also will conduct the influence analysis usher the accurate variable.*

*Pursuant to research result, that Implementation of Rice Policy For The Family of Impecunious in Subdistrict of Kendari West, uncommitted properly, so that its result not yet optimal, this matter is showingthat : ideal policy dimension, its execution not yet optimal because raskin still be imposed by a expense and society which there still not yet can buy, from dimension of policy target in this case society, not yet overcome by full of their requirement, because lowering nya mount the society ability, organizational dimension of executor, that implementor basically have run the the policy, but not yet ditunjukkan seriousness in executing service to impecunious family. Environmental dimension of policy rice for the family of impecunious is not executed by according to operational standard, and also there no good coordination usher the sector, is so that happened by the difference of duty and authority usher the sector*

*Conclusion that implementation of policy rice for the family of impecunious have an effect on the signifikan to effectiveness of overcoming poorness in Subdistrict of Kendari West. Contribution of Variable of Implementation of policy rice for the family of impecunious to*

**A. Latar Belakang Penelitian**

Upaya penanggulangan kemiskinan harus selalu ditumbuhkan, didorong, dan dikembangkan secara bertahap, dan berkelanjutan. Selanjutnya yang terpenting adalah adanya perubahan pandangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Perasaan masa bodoh terhadap upaya pemerintah menjadi

perasaan memiliki dan membutuhkan. Program pembangunan yang orientasinya mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia, sebaiknya tidak terlalu diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan belaka, namun bagaimana menciptakan program-program yang menyentuh aspek manusia. Penciptaan kondisi demikian pada hakekatnya

merupakan pembangunan yang berpusat pada manusia (*human development*). Kebijakan pengentasan golongan penduduk miskin seyogyanya ditujukan untuk pembangunan manusia agar mereka mampu meningkatkan jangkauan pilihannya secara luas.

Untuk menanggulangi kemiskinan, maka perlu adanya suatu kebijakan publik, sebagai landasan dalam melaksanakan kebijakan publik dalam bentuk yang sudah konkrit dan jelas bukan hanya berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah melainkan secara rinci telah menyebut pula alokasi dana, personil dan sumber daya lainnya yang diperlukan, selain dari pada itu isinya memuat pula prosedur kerja yang harus ditempuh dalam menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Santoso (1998: 5) membuat batasan kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan publik terdiri dari serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan –tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Program raskin merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sesuai Peraturan Presiden RI No. 13 tahun 2009, tentang Koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang didukung oleh Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2009 tentang tim koordinasi Raskin Pusat. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Oleh sebab itu, identifikasi masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sesuai hasil penelitian pendahuluan adalah :

- 1) Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan, yang ditandai dengan kurangnya sosialisasi implementasi kebijakan Raskin di Kecamatan Kendari Barat, sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi yang jelas tentang implementasi kebijakan Raskin di Kecamatan Kendari Barat..
- 2) Minimnya kemampuan sumber daya dalam implementasi kebijakan Raskin di Kecamatan Kendari Barat, sehingga sasaran kebijakan atau kelompok sasaran raskin kurang optimal, yang ditandai dengan pendataan masyarakat miskin yang kurang sesuai dengan harapan oleh masyarakat, kemudian pembagian Raskin mengalami berbagai kendala.
- 3), Organisasi pelaksana, yang dalam hal ini adalah sikap dan perilaku para pelaksana yang menunjukkan masih minimnya kesungguhan para pelaksana dalam mengimplementasikan Kebijakan.
- 4) Dari Aspek faktor lingkungan, meliputi lingkungan organisasi pelaksana yang tumpang tindih tugas dan kewenangan serta antar sektor dan antar level serta lingkungan masyarakat sasaran kebijakan Raskin belum sepenuhnya dapat menerima kebijakan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah penelitian :

1. Apakah Implementasi kebijakan raskin berpengaruh terhadap efektivitas Penggulangan kemiskinan di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
2. Seberapa besar pengaruh Implementasi kebijakan raskin terhadap efektivitas penggulangan

kemiskinan di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.

### C. Tinjauan Pustaka

#### 1. Konsep Implementasi Kebijakan

Ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kebijakan yang sering dijumpai antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai dan kurang efektif, dan atau karena komitmen (nilai) yang rendah di kalangan pelaksana. Faktor-faktor politik atau waktu yang kurang tepat serta bermacam alasan lainnya, turut pula mempengaruhi sebuah kebijakan atau program hingga tidak dapat terlaksana dengan baik.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa dalam implementasi kebijakan organisasi pelaksana sangat berperan dan hal ini dapat diwujudkan apabila organisasi pelaksana ini memiliki kemampuan diantaranya kemampuan menginterpretasikan program dan menjadikan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan kelompok sasaran menjadi keputusan organisasi.

Dari uraian tersebut dapat diperoleh suatu gambaran bahwa keberhasilan implementasi itu dapat dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Aspek yang pertama bertalian dengan tiga kegiatan yang harus dilakukan karena ketiga kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai pilar-pilar implementasi. Kegiatan-kegiatan itu yaitu : organisasi, interpretasi dan aplikasi. Aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan unsur-unsur pokoknya, yaitu : Organisasi pelaksana, program (kebijakan) dan kelompok sasaran. Selanjutnya aspek yang ketiga berkaitan dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam implementasi seperti dikemukakan oleh Hogwood.

Menurut Smith (1977: 202-205), implementasi sebagai proses atau alur. Model proses atau alur yang dikemukakan oleh Smith ini terlihat bahwa proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial

dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith (1977: 202-205), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari :

- 1) *The idealized policy, that is, idealized patterns of interaction that those who have defined the policy are attempting to induce.*
- 2) *The target group, defined as those who are required to adopt new patterns of interaction by the policy. They are the people most directly affected by the policy and who must change to meet its demands.*
- 3) *The implementing organization, usually a unit of the government bureaucracy, responsible for implementation of the policy.*
- 4) *The environmental factors, those elements in the environment that influence or are influenced by the policy implementation. The general public and the various special interest groups are here.*

Smith menggunakan model teoritisnya dalam bentuk sistem di mana suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan, maka interaksi di dalam dan di antara keempat faktor tersebut mengakibatkan ketidak sesuaian dan akan menimbulkan tekanan atau ketegangan dari berbagai pihak yang kurang sesuai dengan keinginan. Ketidak sesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan tersebut menghasilkan pola-pola interaksi, yaitu pola-pola tidak tetap yang berkaitan dengan tujuan dari suatu kebijakan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan-balik dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

## 2. Konsep Kemiskinan

Pembangunan sosial kini semakin mendapat perhatian berbagai negara di dunia. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia Untuk Pembangunan Sosial (*World Summit on Soda/ Development*) tahun 1995. Sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut, visi pembangunan sosial terus bergulir hingga kini. Deklarasi dan program aksi tersebut pada intinya memuat komitmen secara tegas dan kuat mengenai perlunya penanganan segera terhadap penyebab utama dan penyebab struktural terjadinya masalah sosial yang dikemas dalam tiga agenda besar yang terdiri dari :

1. Pengentasan kemiskinan,
2. Perluasan kerja produktif dan pengurangan pengangguran, dan
3. Peningkatan integrasi sosial.

Menurut Suharto 2005:17 mengemukakan, Tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Pertama, kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll. Penentuan kemiskinan absolut ini biasanya diukur melalui 'batas kemiskinan' atau 'garis kemiskinan' (poverty line) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, indikator tersebut umumnya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran). Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada di bawah garis kemiskinan,

dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

Kedua, kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan 'kondisi umum' suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp. 100.000 per kapita per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 125.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 200.000 per orang per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk orang miskin.

Ketiga, kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gap hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*needs for achievement*), fatalis, berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa karakteristik yang umumnya dianggap sebagai ciri-ciri kemiskinan kultural.

Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Proses dan praktik monopoli, oligopoli dalam bidang ekonomi, misalnya, melahirkan mata rantai 'pemiskinan' yang sulk dipatahkan. Sekuat apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktural demikian, tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya, karena aset yang ada serta akses terhadap sumber-sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang tertentu. Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau memiliki hanya sedikit tanah, para nelayan yang tidak mempunyai perahu, para pekerja yang

tidak terampil (*unskilled labour*), termasuk ke dalam mereka yang berada dalam kemiskinan struktural.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan khususnya di pedesaan Jawa Barat sebagaimana dikemukakan Iskandar (2001:1) diantaranya : pertama, cepatnya laju pertumbuhan penduduk; kedua, semakin sempitnya lahan pertanian; ketiga, semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada dan terbuka. Dalam komunitas pedesaan, masalah kemiskinan hampir merupakan ciri yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat petani. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kemiskinan terus identik dengan kehidupan sebagian besar petani di pedesaan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka ada beberapa indikator dalam pengukuran efektivitas sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli. Indikator-indikator tersebut menurut Ravianto, (1989:71) yaitu : (1) Satuan Hasil; (2) Satuan Waktu; (3) Kualitas Kerja.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang dikemukakan oleh Smith (1973: 202-205) dengan dimensi-dimensinya yaitu : 1. *The idealized policy*, 2. *The target group*, 3. *The Implementing organization*, 4. *The environmental factors*. Kemudian dimensi yang digunakan sebagai pembentuk efektivitas penanggulangan kemiskinan yaitu 1. Satuan Hasil, 2. Satuan Waktu, 3. Kualitas Kerja.

Sebagai acuan untuk penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, sangat bergantung kepada bagaimana program tersebut diimplementasikan, sebagaimana dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter (1979:51), bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang

telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Wahab (2004:123) yang menyatakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan ataupun sasaran kebijakan negara dapat diwujudkan. Kemudian menurut Mustapadidjaja (2002:10) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang ditempuh guna mewujudkan suatu kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

#### **E. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun hipotesis. Hipotesis ini berfungsi sebagai penuntun selama dalam penelitian (*research-guide*) Adapun rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan raskin berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan.
2. Implementasi kebijakan raskin berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan.

#### **F. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode survai penjelasan (*explanatory survey method*), sesuai dengan tujuan penelitian ini yang akan menganalisis pengaruh antar variabel, yaitu Pengaruh Implementasi kebijakan raskin sebagai variabel bebas (*independent variable*) dengan efektivitas Penggulangan kemiskinan di Kecamatan Kendari Barat, sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu selain menggambarkan dan menjelaskan fakta empirik yang ditemukan di lapangan, juga



akan melakukan analisis pengaruh antar variabel yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif diarahkan untuk mampu mengungkap secara komprehensif pengaruh antara Pengaruh Implementasi kebijakan raskin dengan efektivitas Penggulangan kemiskinan di Kecamatan Kendari Barat. Untuk melengkapi data utama (data primer) juga digunakan observasi sebagai pelengkap dari metode survey.

### **G. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan atau mengarahkan dalam menyusun alat ukur data yang diperlukan berdasarkan variabel yang terdapat pada hipotesis tersebut yaitu : variabel bebas adalah Implementasi kebijakan raskin (X) dan variabel terikatnya adalah efektivitas penanggulangan kemiskinan (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan batasan operasional dari variabel penelitian beserta aspek dan indikatornya sebagai berikut :

### **H. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Populasi penelitian ini adalah organisasi dan sejumlah orang yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan bantuan beras untuk orang miskin (Raskin). yaitu kelompok masyarakat miskin yang membantu menyalurkan bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), yaitu sebanyak 340 orang. Dengan mempergunakan berdasarkan pendapat rumus dari Taro Yamane yang dikutip oleh Rachmat dalam Riduan (2004:5) maka jumlah sampel yaitu sebesar 77 orang.

### **I. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Kuesioner**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data mengenai variabel-variabel penelitian ini yaitu, variabel bebas X, dan variabel tak bebas Y dilakukan dengan melalui daftar pertanyaan dan pernyataan yang akan dijawab oleh responden.

Pengukuran data pada variabel bebas dilakukan dengan memberi jenjang terhadap gejala yang diukur dengan menggunakan skala likert, terhadap sejumlah persetujuan, responden akan diminta untuk menyatakan persetujuannya yang terkategori dalam macam jawaban, yaitu Sangat Setuju, (SS), “ Setuju” (S), “Ragu-ragu” (R), “Tidak Setuju” (TS), dan “ Sangat Tidak Setuju” (STS)

Skala pengukuran yang telah ditentukan dalam penelitian ini menggunakan cara sederhana yaitu dengan menentukan letak masing-masing dari 5 kategori respons pada kontinumnya yang bergerak antara angka 5 sampai dengan 1,

Pernyataan seperti disebut sebagai pernyataan yang tidak (*farorabel*), (Azwar, 1995 : 107).

### **2. Wawancara**

Dalam penelitian ini wawancara terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang, yaitu :

- a. Camat Kendari Barat
- b. Sekertaris Kecamatan Kendari Barat
- c. Lurah yang berada di Kecamatan Kendari Barat.
- d. 1 orang Tokoh masyarakat yang dipilih oleh peneliti yang mendapat pengakuan dari lingkungannya dalam

memberikan informasi tentang hal tersebut.

### 3. Studi Dokumentasi

Selain kedua tehnik pengumpulan data tersebut yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan satu teknik lagi yakni studi dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data skunder yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini dengan studi dokumentasi peneliti akan mengumpulkan buku, jurnal atau sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kebijakan Raskin. Kegiatan ini peneliti lakukan berfungsi juga sebagai landasan teoritis untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

### J. Pengujian Hipotesis

Hasil perhitungan tersebut memberikan gambaran yang mengatakan bahwa Implementasi kebijakan raskin berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. ternyata terbukti kebenarannya. Pembuktian ini ditandai dengan pengaruh X terhadap Y adalah 0,452. atau 45,2%, dengan derajat kepercayaan 95%. Angka perhitungan ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi kebijakan raskin belum optimal dalam mempengaruhi Efektivitas Penanggulangan kemiskinan yaitu hanya sebesar 45,2%, dan masih dipengaruhi variabel-variabel dari luar yang lebih besar, dengan demikian dalam pelaksanaan kebijakan raskin cukup berperan namun belum optimal dalam meningkatkan Efektivitas Penanggulangan kemiskinan.

Hipotesis yang mengatakan bahwa Implementasi kebijakan raskin berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan, ternyata terbukti kebenarannya. Pembuktian ini ditandai dengan koefisien jalur X terhadap Y adalah 0,431. atau 43,1%, dengan derajat kepercayaan 95%. Angka perhitungan ini menunjukkan

bahwa variabel Implementasi kebijakan raskin turut mempengaruhi Efektivitas Penanggulangan kemiskinan sebesar 43,1%, dengan demikian bahwa pengaruh diluar Implementasi kebijakan raskin lebih besar, namun demikian dalam penanggulangan kemiskinan cukup berperan dalam mengurangi Efektivitas Penanggulangan kemiskinan, sebab apabila variabel Implementasi kebijakan raskin kurang baik dalam pelaksanaannya maka Efektivitas Penanggulangan kemiskinan tidak akan terwujud secara maksimal sesuai dengan kebijakan yang ada.

### K. Pembahasan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebijakan ideal adalah Cukup yaitu sebesar 67.01% dari seluruh pertanyaan pada dimensi variabel tersebut. Hasil itu, mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan indikator-indikator tentang kebijakan ideal belum dilaksanakan dengan optimal. Perumusan dan penyusunan tentang operasionalisasi implementasi kebijakan yang harus ditempuh dan dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman dan penyebar luasannya belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sejalan yang dikemukakan oleh Nugroho (2003: 263) mengatakan bahwa kebijakan yang ideal adalah harus kontekstual atau mengacu kepada tantangan yang dihadapi pada saat ini dan dimasa depan. Agusti (2001: 50) menyebut model seperti ini sebagai sebuah pragmatisme dalam kebijakan publik, sebuah pola yang banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang dan maju dikawasan Asia. Dengan model ini dapat disertakan dengan model kebijakan yang menggunakan rasio "untung-rugi" dari sebuah kebijakan, seperti yang diperkenalkan dalam paradigma *cost benefit* analisis Boardman dkk, (1996:102), Pada prakteknya, ternyata

memang demikian adanya. Setiap kebijakan harus mengandung unsur pragmatisme dan untung rugi. Tentu saja, pemahamannya pertama kali diletakkan didalam konteks etika, yaitu tentang kebaikan dan keburukan.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk *The idealized policy* bahwa dengan adanya kebijakan untuk menanggulangi angka putus sekolah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dengan dukungan dana tersedia dalam program beras untuk masyarakat miskin telah tersedia dananya, namun karena pendataan masyarakat miskin belum optimal sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan jatah beras untuk masyarakat miskin.

Demikian pula hasil penelitian, banyak masyarakat yang kurang layak mendapatkan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) sesuai ketentuan yang berlaku, tapi kenyataannya menerima beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), demikian juga sebaliknya ada masyarakat miskin yang layak untuk mendapatkan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tapi tidak mendapatkan, hal ini terlihat adanya kesalahan dalam pendataan, yang mungkin disebabkan adanya kolusi, nepotisme ataupun kinerja petugas yang relatif masih rendah. Disisi lain salah tujuan program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) tersebut adalah untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan daya beli, bahkan diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan, namun karena pelaksana kebijakan kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga masih terdapat kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam pendataan masyarakat miskin, khususnya yang dilakukan oleh petugas pendataan atau pencacahan penduduk,

Dari hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa adanya masyarakat yang tidak mengambil

jatahnya, kemungkinan dijual kepada orang lain yang sanggup mengambil jatah tersebut.

Melihat jawaban dari dimensi sasaran kebijakan, terlihat bahwa dimensi sasaran kebijakanyang ada belum dimanfaatkan secara optimal, artinya mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan raskin berkaitan dengan sebagian indikator tentang sasaran kebijakan belum dilaksanakan secara optimal.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Islamy (1997:119) bahwa kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (*intended*) maupun yang negatif (*unintended*). Ini berarti konsep dampak menekankan pada apa yang terjadi secara aktual pada kelompok yang ditargetkan dalam kebijakan. Jadi dengan melihat konsekuensi dari dampak, maka dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan, dan juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan yang akan meningkatkan kualitas kebijakan tersebut.

Dampak perubahan tertentu dalam sumber-sumber dan sikap kelompok masyarakat terhadap tujuan undang-undang dan output-output kebijaksanaan lembaga-lembaga pelaksana memainkan peran yang cukup penting dalam proses implementasi. Dalam kaitan ini dilema yang biasanya dihadapi oleh para penganjur program apapun yang berusaha untuk mengubah perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran ialah bahwa derajat dukungan publik atas program-program tersebut berbeda-beda dari waktu ke waktu. Biasanya, undang-undang itu lahir sebagai akibat dari semakin kuatnya perhatian serta keprihatinan masyarakat terhadap

masalah-masalah umum, semisal masalah pelestarian lingkungan, perlindungan konsumen, atau pembebasan biaya sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk *The target group* bahwa dukungan masyarakat cukup tinggi terhadap implementasi kebijakan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), sehingga pada umumnya setelah menerima Raskinada yang menjual dan dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak sekolah yang merupakan aset keluarga, bangsa dan negara, dalam meningkatkan sumber daya manusia. Namun demikian walaupun masyarakat merasakan adanya penambahan penghasilan mereka, tetapi pada umumnya mengatakan bahwa implementasi Raskin belum bisa mengubah perilaku mereka dalam hal peningkatan kesejahteraan sehingga pemanfaatan program paket B relatif belum terlaksana dengan baik sesuai tujuan, kemudian pada umumnya juga masyarakat penerima program Raskin belum mengetahui program tersebut. Salah satu penyebabnya secara umum adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Supriatna (1997:90), bahwa terdapat relevansi yang positif dan kuat antara gejala kemiskinan penduduk di pedesaan dan perkotaan di satu sisi, dengan pendidikan formal dan nonformal disisi yang lain.

variabel faktor Lingkungan adalah Tinggi yaitu sebesar 67.81 % dari seluruh pertanyaan pada dimensi tersebut. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan indikator-indikator pembentuk faktor Lingkungan masih belum optimal.

Melalui jawaban responden, dapat diketahui bahwa faktor Lingkungan, dalam pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya.

Demikian pula halnya dengan kebijakan publik. Kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya (sosial, politik, ekonomi, maupun budaya). Dimana pada satu saat kebijakan publik menyalurkan masukan pada lingkungan sekitarnya, dan pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar dapat membatasi dan memaksakannya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambil keputusan/pembuat kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling pengaruh.

Menurut Anderson (1997: 3), kebijakan publik adalah (*a purposive course of action followed by an actor on set actors in dealing with a problem or matter of concern*). Jadi pada prinsipnya bahwa kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan masyarakat penerima raskin mengemukakan bahwa :

Pada prinsipnya bahwa implementasi tentang kebijakan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), sangat terbantu yang dirasakan oleh masyarakat miskin, namun karena masih ada kompensasi atau pembayaran harga beras, walaupun murah harganya tetapi tidak semua masyarakat mempunyai uang untuk menebus harga tersebut, sebaiknya pemerintah memberikan saja secara gratis supaya masyarakat dapat yang tidak mempunyai uang juga terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Hasil Wawancara, 2015).

Hal ini didukung oleh Dye, (1987: 68) memberikan batasan mengenai kebijakan publik adalah semua pilihan atau

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (*Whatever government choose to do or not to do.*). Selanjutnya, menurut Dye bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektif) dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Sebab sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam hal perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi negara/pemerintah sebagai stabilisator, stimulator, koordinator, dan alokator, Dye (1987: 23) mengemukakan bahwa setiap kebijakan pemerintah seharusnya mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana yang ada dalam lingkungan dan politiknya. Dalam setiap studi kebijakan, maka aspek lingkungan harus memperoleh pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga tidak bertentangan dengan fungsi negara atau pemerintah itu sendiri.

Sasaran dan tujuannya ialah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan kaum petani, pengrajin, nelayan, pertukangan, pengusaha kecil, pedagang dan lain sebagainya, yang tergolong penduduk miskin. Informasi berupa pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan, yang menumbuhkan nilai dan sikap efektif penduduk miskin merupakan dasar bagi aktivitas hidup dan perubahan kehidupan, informasi memiliki makna penting bagi peningkatan aset sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memacu produktivitas kerja, kemandirian, dan perubahan kehidupan sosialnya.

Dari hasil penelitian pada dimensi *The target group* bahwa pada umumnya

masyarakat penerima Raskin belum mengetahui program Raskin, pada umumnya mengatakan bahwa tidak perlu mengetahui sebab bukan urusan mereka, yang penting pemerintah menyalurkan bantuan Raskin untuk masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian lingkungan kebijakan yang lebih spesifik perlu dipahami dalam pemaknaan yang plural. Ia harus dipahami dalam tiga kategori besar, pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti: karakteristik birokrasi, sumberdaya yang dimiliki, sumberdaya finansial yang tersedia, dan macam sebagainya. Ketiga, lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan. Tidak hanya itu, beberapa bentuk lingkungan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan kebijakan publik, baik dilihat dari sisi formulasi, implementasi, hingga evaluasi atau bahkan perubahan kebijakan publik, antara lain adalah: karakteristik geografis, seperti sumber-sumber alam, iklim, sampai dengan topografi; variabel demografi, seperti populasi masyarakat, persebaran usia, hingga lokasi; budaya politik; sistem sosial; serta sistem ekonomi. Negara lain juga menjadi bagian penting dalam struktur lingkungan kebijakan, khususnya berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri

Dalam lingkungan pembuatan kebijakan melibatkan para pembuat kebijakan seperti Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati dan individu lain yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Dalam lingkungan implementasi pihak yang terlibat juga jauh lebih bervariasi, tergantung dari jenis kebijakan yang ditetapkannya. Mereka adalah terdiri dari

pembuatan kebijakan, pelaksana kebijakan, kelompok masyarakat yang terkait dengan kebijakan, media massa, penilai dan lain-lain. Sedangkan yang terkait dalam lingkungan evaluasi adalah para pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan.

Dalam perkembangan implementasi kebijakan faktor lingkungan cukup berpengaruh keberhasilan atau kegagalan kebijakan, konteks lingkungan dikedepankan karena perubahan yang terjadi hari ini dan dimasa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya namun dukungan lingkungan juga mempengaruhi

Sesuai hasil wawancara dengan masyarakat penerima kebijakan raskin mengatakan bahwa :

Kebijakan raskin yang diberikan oleh pemerintah dapat meringankan kebutuhan masyarakat miskin khususnya yang ada di perkotaan, namun belum bisa menanggulangi manyangkut kemiskinan yang ada, karena jumlah yang diberikan cukup terbatas dan masih dibebankan untuk membayar walaupun harganya relatif murah, yang kami harapkan supaya pemerintah memberikan gratis dan jumlah yang dapat mencukupi dalam satu bulan.(Wawancara dengan masyarakat penerima raskin, 2015).

Dalam hubungan ini, akan dititik beratkan pada pembahasan faktor lingkungan yang banyak diperhatikan oleh para peneliti kebijakan publik, untuk memahami pengaruhnya terhadap kebijakan yang tercipta.

## **L. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengukuran terhadap variabel Implementasi kebijakan Raskin melalui dimensi-dimensi (1) Kebijakan ideal, (2) Sasaran Kebijakan, (3). Organisasi, (4) Faktor lingkungan kehadiran, mempunyai berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kendari Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan angka yang berada pada kategori sedang yang berarti bahwa Implementasi kebijakan Raskin telah dilakukan, namun belum optimal sebagaimana yang diharapkan karena belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dimensi-dimensi tersebut.
2. Implementasi kebijakan Raskin berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kendari Barat. Sumbangan variabel Implementasi kebijakan Raskin terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan berada pada kategori cukup. Hal tersebut terjadi karena Implementasi kebijakan Raskin yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah ditentukan, sehingga belum terlaksana dengan optimal.

## **M. Saran-saran**

- a). Pelaksanaan sosialisasi dan pendataan masyarakat miskin dengan baik perlu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar data-data masalah kemiskinan tersedia dengan jelas.
- b). Perlunya pembinaan sumber daya manusia, agar masalah-masalah yang timbul misalnya pada pendataan dan sosialisasi setiap program dapat dilaksanakan dengan baik, serta pembagian raskin dapat lebih disempurnakan.
- c). Intitusi terkait agar lebih meningkatkan koordinasi pelaksanaan program, sesuai bidang dan fungsi masing-masing intitusi, sehingga nampak peran masing-

masing intitusi dalam peningkatan penanggulangan kemiskinan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dessler, Gary., 1998. *Manajemen Sumber DayaManusi*.Alih Bahasa, Molan,B. Jakarta : Prenhallindo.
- Dror, Yehezeikel., 1968. *Public Policy Making Re-examined*, San Fransisco: Chandler Publishing Co.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakanaksanaan Publik*. Alih Bahasa: Muhadjir Darwin. Yogyakarta : Hamindita Offset.
- Dunsere, A. 1978. *Implementation in bereaucracy*, Martin Robertson, Oxford.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*, New Jensey: Prentice Hall, Inc.
- Epstein, D., 1988. *The Political System*, New York: Knopf.
- Edwards III, George, C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*, New Jersey. Princeton University Press.
- Guilford, 1956. *Fundamental Statistic in Psychology and Education*, McGraw-Hill, Tokyo.
- Hogwood, BW., and LA., Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. New York: Oxford University Press.
- Hoogerwerf, A. 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta :Penerbit Erlangga.
- Irawan, Handi D. 2002. *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : PT.. Elex Media Kompotindo.
- Iskandar, 2006. *Birokrasi Indonesia Kontempore*.Bandung : Alqa Print.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1995. *Kebijakan Publik (Public Policy)* Editor Natsir Budiman, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jones, Gareth R. 1995. *Organizational Theory, Text and Cases*.Texas A-M University.by Addison–Wesley Publishing Company, INC.
- Kasali, Rhenald, 1994. *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya diIndonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997., *Membangun Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataa*. Jakarta : Cides.
- Korten, David C. and Rudi Klauss, 1984. *People Centered Development: Contribution Toward Theory and Planning Frameworks*. West Hartford: Kumarian Press.
- Lembaga Administrasi Negara, 2003. (a), *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Lane, Jan Erik, 1995. *The Public Sector Concepts, Models and Approachs*

- Sage Pafercations*, London, Newbury, Park, new Delhi.
- Lasswell, Harold D. dan Abraham, Kaplan. 1987. *Power and Society*, New Hasen : Yale University Press.
- Lindblom, Charles E. 1965. *The Intelligence of Democracy*. New York : Free Press.
- Maleong, Laxy. 1990. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Maslow, Abraham H. 1994. *Motivasi dan Kepribadian Teori Motivasi dengan Pendekatan Hirarki Kebutuhan Manusia*. Seri Manajemen Nomor 104.A. Jakarta: Pustaka Binama Pressindo.
- Mayer, Robert R. 1980. *The Design of Social Policy Research* (terjemahan Sutan Zanti). Jakarta : Pustekom Dikbud dan CV Rajawali.
- Mazmanian, Daniel, and Paul A.Sabatier. 1981. *Effective Policy Implementation*, Lexington Mass DC:Healt.
- McFarland, Dalton E. 1964. *Management Principle and Practice*. New York: The McMillan Publishing Company, 2nd ed.
- Meltner, A. 1976. *Policy Analysis in the Bureaucracy*, Berkeley, CA, University of California.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipasi dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Miller, G. and TM. Moe. 1983. *Bureaucrats, Legislators and the Size of Government*. American Political Review.
- Muller, D. 1986. *The Modern Corporation Hemel*, Hemstead, Harvester.
- Mustopadidjaja, A.R., 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Ndraha, Talidziduhu, 2001. Ilmu Pemerintahan (*Kybernology*), Bandung : Program Pascasarjana Ilmu Pemerinahan IIP-Unpad.
- Nugroho, R., 2003 *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Santoso, Amir, 1998. *Beberapa Masalah Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Smith, B.C., 1977. *Policy Making in British Government*, London : Martin Robertson.
- Soekirman, 1992. *Kemiskinan dan Kesejangan Sosial*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suharto, Edi., 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung : Alfa Beta.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Suryawikarta, 1996. *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta : Gramedia



Tjokroamidjojo, Bintoro dan AR. Mustopadidjaja. 1991. *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan : Perkembangamn Teori dan Penerapan*, Jakarta : Masagung.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1976., *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Jakarta : Pustaka Pelajar.  
Winardi., J. 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Tarsito

ISSN : 2443-1214

**e-JKPP**

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 1 No. 3 Desember 2015

**Diterbitkan Oleh :**  
**Program Pascasarjana**  
**Magister Ilmu Administrasi**  
**Universitas Bandar Lampung**

